Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 10 Nomor 1 (2026) 182-193

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Marliana Eka Fauzia [a], Zulfaisya Nur Halimah[b], Yunita Intan Hapsari [c]
[a b c] Administrasi Publik FISIP Universitas Tulungagung, Indonesia
E-mail: fauziamarliana27@gmail.com

ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi stunting. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka dengan sumber data dari buku, jurnal, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Program MBG telah memberikan keuntungan awal berupa peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan penurunan beban biaya keluarga. Akan tetapi, pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena masih ada masalah distribusi, keterlambatan dana, kualitas makanan, dan pengawasan pangan. Kesimpulannya, Program MBG di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya sukses dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, namun menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjalankan peran negara kesejahteraan. Peningkatan tata kelola dan mutu layanan diperlukan agar program dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, kesejahteraan masyarakat, implementasi kebijakan, Tulungagung.

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) in promoting public welfare in Tulungagung Regency. The program is intended to fulfill the nutritional needs of students, pregnant women, breastfeeding mothers, and toddlers as a strategic measure to improve the quality of human resources and reduce stunting. This research employed a qualitative approach through a literature review, utilizing data sources from books, academic journals, policy documents, official reports, and other relevant publications. Data were analyzed through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the MBG Program has generated initial benefits, particularly in improving access to nutritious food and reducing household financial burdens. However, its implementation has not yet reached optimal effectiveness due to persistent challenges related to distribution systems, funding delays, food quality, and food safety supervision. In conclusion, the MBG Program in Tulungagung Regency has not been entirely successful in creating public welfare, yet it represents a strategic governmental initiative in fulfilling the functions of a welfare state. Improvements in governance and service quality are necessary to ensure the program becomes more effective and sustainable.
Keywords: *Free Nutritious Meal Program, public welfare, policy implementation, Tulungagung Regency.*

* Corresponding Author.
E-mail: fauziamarliana27@gmail.com

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana program Makan Bergizi Gratis selanjutnya disebut MBG memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada kelompok rentan gizi di Tingkat daerah. Kita ketahui program MBG menjadi program prioritas nasional yang diselenggarakan pemerintah dalam bentuk memberikan makanan bergizi gratis dengan mengklasifikasi sasaran strategis seperti anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Hal ini berujuan untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia. Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara taklimat awal tahun mengatakan bahwa anak Indoensia masih mengalami kekurangan gizi dengan presentase lebih dari 20 sampai 30 persen (Humas, 2026). Tidak hanya itu Presiden Prabowo juga menjalaskan bahwa puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Melihat kondisi tersebut negara dituntut untuk hadir dalam melakukan intervensi secara langsung secara terukur demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa melalui program MBG. Selaras dengan pendapat Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa 60% anak-anak kurang mampu tidak memiliki akses yang baik dalam pemenuhan gizi seimbang. Anak-anak tersebut dikatakan jarang mengkonsumsi susu dikarenaka tidak memiliki kemampuan untuk membeli. (Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, 2025).

Program MBG secara resmi diatur dalam Peraturan preseiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis. Peraturan Presiden terebut bertujuan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam menyelenggaraan Program MBG. Serta sebagai pedoman bagi beberapa lembaga yang terlibat didalamnya seperti orang perongan, badan usaha, badan hukum, serta pihak terkait yang mendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program MBG. Program MBG diharapkan dapat mendorong pemanfaatan pangan lokal. Menurut data dari Word Resources Institue (WRI) Indonesia 15 % kabupaten/kota di Indonesia yang berpenduduk miskin memiliki angka prevelensi tengkes stunting diatas rata-rata nasional 21,6 % Word Resources Institue (Romauli Panggabean, 2025). Sehingga kemungkinan besar daerah tersebut akan menjadi prioritas utama program MBG. Program ini selain memiliki tujuan untuk memenuhi asupan nutrisi pada anak-anak usia sekolah, juga menjalin kerjasama dengan daerah untuk pemanfaatan pangan lokal. Hal ini dapat meminimalisir pembuangan karbon dari logistik, memepercepat pendistribusian, dapat melakukan penyerapan tenaga kerja di tingakat lokal serta diharapkan mempertumbuh ekonomi lokal.

Niat mulia dalam program MBG tidak berjalan dengan mudah, beberapa daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga implementasinya perlu ditinjau dan diperkuat kembali. Kendala dalam pelaksanaan program MBG antara lain :

1. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah mengalami berbagai tantangan yang bersifat struktural, administratif, dan teknis operasional. Salah satu tantangan utama adalah isu distribusi dan logistik, terutama di daerah terpencil serta wilayah dengan akses transportasi yang minim. Rantai distribusi makanan yang panjang mengakibatkan keterlambatan pengiriman dan bisa menurunkan kualitas makanan yang diterima oleh siswa. Di samping itu, keterbatasan alat transportasi dan kondisi geografi yang sulit menjadi faktor penghalang dalam menjamin makanan tiba tepat waktu dan dalam keadaan layak konsumsi (Herdiana, 2025).
2. Kendala selanjutnya berhubungan dengan terbatasnya infrastruktur penunjang pelaksanaan program MBG di daerah. Banyak sekolah atau unit pelaksana yang masih belum dilengkapi dengan fasilitas dapur umum, peralatan penyimpanan makanan, serta sarana sanitasi yang memadai. Keadaan ini berdampak pada kualitas pengolahan makanan dan keamanan pangan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya keracunan makanan atau penurunan kualitas gizi. Ketidaksamaan infrastruktur di berbagai daerah turut mengakibatkan disparitas dalam kualitas layanan program MBG (Basuki et al., 2026).
3. Di samping itu, pelaksanaan program MBG juga mengalami hambatan dalam koordinasi antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain. Tidak cukupnya koordinasi

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia layanan makanan dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang dan memperlambat proses keputusan. Koordinasi yang belum maksimal juga dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya serta pelaksanaan program di lapangan (Raihan A. Hanasi et al., 2025) .

4. Dari aspek regulasi, pelaksanaan program MBG masih menghadapi kendala karena belum adanya kerangka hukum yang menyeluruh dan petunjuk operasional yang jelas di tingkat daerah. Ambiguitas dalam regulasi dapat menyebabkan perbedaan penafsiran saat melaksanakan program dan meningkatkan potensi kesalahan administratif. Ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan legalitas dan pedoman pelaksanaan yang terpadu agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Orbawati et al., 2025)
5. Masalah lain yang cukup berarti adalah kekurangan dana dan pengaturan anggaran untuk program MBG. Program ini memerlukan alokasi anggaran yang signifikan dan berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah harus memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program. Keterbatasan dana dapat berdampak pada mutu makanan, jumlah penerima manfaat, serta kelangsungan program dalam waktu lama. Di samping itu, pengelolaan anggaran yang tidak transparan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana atau efisiensi dalam penggunaan anggaran (Agustini, 2025).
6. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan program juga merupakan salah satu hambatan yang sering dijumpai di daerah. Mekanisme pengawasan yang masih kurang baik menyulitkan untuk memastikan bahwa standar kualitas makanan dan prosedur operasional diikuti oleh semua pelaksana program. Kurangnya pengawasan juga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran administratif, penyimpangan anggaran, serta isu keamanan pangan (Basuki et al., 2026)
7. Masalah lain berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Tidak semua staf pelaksana memiliki kemampuan yang cukup dalam pengolahan makanan sehat, pengelolaan logistik, dan manajemen program. Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dapat berdampak pada mutu layanan serta efisiensi pelaksanaan program di wilayah (Herdiana, 2025)
8. Selain faktor internal pemerintah, keterlibatan masyarakat juga merupakan salah satu elemen yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program MBG di daerah. Rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengawasan dan dukungan terhadap program, dapat menghalangi pelaksanaan program dengan efektif. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program sangat penting untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam kebijakan publik (Fatimah et al., 2024)
9. Perbedaan wilayah juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program MBG di Indonesia. Berbeda-beda kondisi geografi, kapasitas fiskal daerah, dan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan pelaksanaan program tidak merata di semua daerah. Wilayah perkotaan umumnya menyediakan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil, sehingga kualitas layanan program MBG seringkali bervariasi antar daerah (Orbawati et al., 2025)
10. Aspek keamanan pangan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. Beberapa insiden keracunan makanan yang berlangsung menunjukkan bahwa standar kebersihan dan sanitasi belum sepenuhnya diterapkan dengan konsisten. Hal ini menekankan pentingnya pengawasan kualitas bahan pangan, proses pengolahan, dan distribusi makanan agar program MBG mampu memberikan manfaat kesehatan maksimal bagi peserta didik (Basuki et al., 2026)

Oleh karena itu, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan lembaga pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Keadaan ini menandakan bahwa program MBG adalah salah satu usaha pemerintah dalam memenuhi hak fundamental warga, terutama dalam aspek pemenuhan gizi dan kesejahteraan sosial. Untuk memahami peran negara

dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui program MBG, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai konsep dan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) serta hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal

Konsep *walfare state* merupakan gagasan terkait sistem pemerintahan demokratis yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Adapun tujuan dari konsep negara kejahteraan ini untuk mengurangi, kemisikinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebaginya. Sehingga dapat dikatakan negata kesejahteraan ini bentuk kebijakan public yang terfokus pada pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan segala permasalahan sosial (Huda, 2009). Teori negara kesejahteraan juga berlandaskan pemikiran ekonomi John Maynard Keynes yang menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan sosial. Model ini berbeda dari negara minimal (laissez-faire) karena negara kesejahteraan tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik dan redistributor sumber daya untuk mencapai keadilan sosial (Keynes, 2018).

Dalam konteks teori *welfare state*, penerapan program MBG pada tingkat lokal mencerminkan desentralisasi fungsi negara dalam memberikan layanan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan kontemporer yang menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan layanan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi program MBG di tingkat lokal sangat tergantung pada kapasitas institusi pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, dan tata kelola yang efektif.

Salah satu daerah penerima manfaat program MBG adalah Kabupaten Tulungagung provinsi Jawa Timur. Bupati Tulungagung Gatut Sunu menekankan terkait pentingnya sinergi antara pemerinta pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menyukseskan program MBG. Gatut Sunu juga menegaskan optimisme pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan Program MBG mampu memberikan peningkatan gizi yang berkualitas bagi peserta didik sekaligus untuk terwujudnya generasi sehat, cerdas, dan produktif di Kabupaten Tulungagung (Lukman, 2026). Tulungagung dipilih sebagai tempat penelitian program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena daerah ini merupakan salah satu lokasi yang secara aktif menjalankan program nasional tersebut dan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, serta kelembagaan yang relevan untuk dianalisis secara ilmiah.

Alasan penting yang mendasari pemilihan lokasi Kabupaten Tulungagung adalah, Tulungagung merupakan salah satu wilayah yang telah dijadikan lokasi pelaksanaan dan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara intensif oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) serta DPR RI. Berbagai kegiatan implementasi dan pengawasan program telah dilaksanakan di sejumlah sekolah dan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Tulungagung tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat program, tetapi juga sebagai bagian dari pengujian nyata implementasi kebijakan nasional. Selain itu, Kabupaten Tulungagung memainkan peran penting dalam pengembangan program MBG berbasis kolaborasi antar lembaga lokal, melibatkan pemerintah daerah, BUMDes, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadikan Tulungagung sebagai contoh strategis untuk memahami penerapan kebijakan gizi di tingkat daerah, terutama dalam aspek koordinasi dan efektivitas pelaksanaan. Dari perspektif pembangunan manusia, Tulungagung juga berkaitan dengan persoalan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana program MBG diarahkan untuk menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas generasi muda. Di sisi lain, Tulungagung menunjukkan dinamika implementasi kebijakan yang cukup kompleks, mulai dari distribusi, keterbatasan sumber daya seperti tenaga dapur dan logistik, hingga evaluasi efektivitas program di lapangan. Kondisi tersebut membuka peluang analisis yang mendalam dari sudut pandang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam melihat kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaannya. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Kabupaten Tulungagung dapat dikategorikan sebagai lokasi penelitian yang tepat, representatif, dan strategis

untuk menganalisis pelaksanaan Program MBG dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek kebijakan, tata kelola, maupun dampak sosialnya.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Ucu Agustin menegaskan bahwa MBG berfungsi sebagai inisiatif sosial di bidang pendidikan karena berpengaruh terhadap peningkatan status gizi siswa, tingkat kehadiran, dan konsentrasi belajar (Agustini, 2025. Namun demikian, studi tersebut juga mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan anggaran, distribusi makanan, serta koordinasi antar lembaga. Sejalan dengan itu, Rohanaan Maulana Basuki melalui pendekatan evaluatif menemukan berbagai hambatan teknis seperti penyediaan bahan baku, pengawasan mutu, dan keterlambatan distribusi, sehingga diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar implementasi kebijakan berjalan optimal (Basuki et al., 2026).

Selanjutnya, penelitian lain menyoroti dimensi ekonomi lokal dengan menunjukkan bahwa keberhasilan MBG dipengaruhi oleh stabilitas pasokan pangan, kejelasan SOP, serta komitmen pelaksana di tingkat sekolah dan daerah (Raihan A. Hanasi et al., 2026). Selain meningkatkan gizi, program ini juga mendorong permintaan produk pertanian lokal, melibatkan UMKM katering, serta menciptakan efek pengganda ekonomi. Akan tetapi, tantangan seperti pembagian kewenangan yang belum jelas, keterbatasan infrastruktur, dan disparitas kapasitas antar daerah masih menjadi hambatan. Temuan ini diperkuat oleh pembuktikan penelitian bahwa MBG berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan stabilitas keuangan rumah tangga, meskipun peningkatan kesejahteraan pekerja terjadi secara tidak langsung melalui variabel perantara berupa kestabilan finansial keluarga (Kelara et al., 2025).

Di sisi lain, beberapa studi lebih menekankan aspek implementasi kebijakan di tingkat daerah dan satuan pendidikan seperti di Kota Semarang, menunjukkan bahwa MBG efektif meningkatkan kehadiran dan konsentrasi siswa sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting, meskipun masih terdapat kendala logistik dan koordinasi lintas sektor (Nurulaini & Afifah, 2025). Penelitian lain juga menemukan bahwa tantangan implementasi meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi, khususnya di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses informasi dan infrastruktur (Pora & Muksin, 2025). Penelitian di SMA Negeri 2 Painan mengonfirmasi bahwa pelaksanaan MBG telah melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, tetapi distribusi makanan masih terkendala fasilitas transportasi. Penelitian lain di Kota Jambi yang menyoroti dominasi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan serta lemahnya koordinasi dan kesiapan kelembagaan di daerah(Abdillah et al., 2025) .

Dengan demikian, keseluruhan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kesiapan sumber daya dan infrastruktur, serta sistem pengawasan yang efektif. Sehingga program ini dapat berfungsi ganda sebagai instrumen peningkatan gizi sekaligus penguatan kesejahteraan sosial dan ekonomi lokal. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah banyak dikaji sebagai kebijakan pemenuhan gizi sekaligus instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, keunikan (novelty) studi ini terletak pada pendekatan yang mengedepankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari fungsi negara kesejahteraan *(welfare state*) dalam memastikan pemenuhan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal melalui peran pemerintah daerah. Studi ini secara khusus mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tulungagung dengan menilai hubungan antara penerapan kebijakan, kemampuan kelembagaan daerah, serta efektivitas layanan publik dalam memenuhi kebutuhan gizi dan kesejahteraan warga. Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung sebagai representasi peran negara dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan pelaksanaannya, serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur. Kajian pustaka dipilih karena memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dokumen dan teks yang berhubungan guna memahami suatu fenomena secara mendalam melalui penafsiran bahan (Creswell & Creswell, 2017). Data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan publikasi lain yang berhubungan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di Kabupaten Tulungagung. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga langkah utama, yakni mengidentifikasi sumber, memilih sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas, serta mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Sumber yang dipilih ditentukan untuk menjamin relevansi terhadap masalah pelaksanaan kebijakan gizi dan kesejahteraan masyarakat. Analisis data dilaksanakan melalui tiga langkah, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pengurangan data dilakukan dengan meringkas dan memilih informasi penting yang berhubungan dengan pelaksanaan Program MBG. Data disajikan dengan mengatur informasi dalam bentuk naratif untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, kesimpulan ditarik untuk merumuskan temuan utama mengenai pelaksanaan Program MBG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program MBG Di Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung adalah salah satu wujud realisasi konsep negara kesejahteraan (welfare state) dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan dan gizi. Dalam ide negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan publik yang cukup, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat. Ini terlihat dari usaha pemerintah dalam menyediakan layanan pemenuhan gizi melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program di wilayah. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung telah memiliki 123 unit SPPG sebagai media pelaksanaan program MBG, yang menjadi tanda komitmen negara dalam memperluas akses layanan gizi untuk masyarakat) (Badan Gizi Nasional, 2026). Kehadiran unit layanan itu mencerminkan bahwa negara tidak sekadar bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penyedia layanan sosial yang langsung berinteraksi dengan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sebagai salah satu bentuk pelayanan sosial, pelaksanaan program MBG di Tulungagung juga menggambarkan peran negara dalam memastikan hak masyarakat terhadap kesehatan dan kesejahteraan sosial. Program ini menargetkan kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak kecil sebagai penerima manfaat utama. Sebagai contoh, salah satu unit SPPG di daerah Polres Tulungagung telah memberikan layanan kepada sekitar 3.047 penerima manfaat, yang terdiri dari anak-anak sekolah, wanita hamil, ibu menyusui, dan anak balita, sebagai wujud usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat (Destyan H. Sujarwoko, 2025a). Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan yang menempatkan perlindungan untuk kelompok rentan sebagai prioritas dalam kebijakan publik.

Meski begitu, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tulungagung juga memperlihatkan bahwa penerapan negara kesejahteraan di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan kebijakan. Salah satu hambatan utama adalah belum tercapainya sasaran penerima manfaat di tahap awal pelaksanaan program. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja di dapur umum, sehingga hasil produksi makanan belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh penerima manfaat sesuai dengan target yang telah ditentukan. Contohnya, di salah satu dapur umum yang dioperasikan oleh institusi pendidikan, jumlah makanan yang dihasilkan hanya 1.386 porsi dari target 3.480 porsi, yang menandakan adanya batasan kapasitas layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Destyan H. Sujarwoko, 2025b). Ini menunjukkan bahwa kesuksesan negara kesejahteraan dipengaruhi tidak hanya oleh kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia serta infrastruktur layanan publik.

Selain batasan kapasitas layanan, pelaksanaan program MBG di Tulungagung juga mengalami hambatan dalam aspek pendanaan dan kesinambungan layanan. Beberapa unit SPPG dilaporkan pernah menghentikan operasionalnya sementara karena dana operasional belum diterima dari pemerintah pusat. Pemberhentian layanan ini berlangsung di beberapa daerah, seperti Kecamatan Boyolangu dan Sumbergempol, yang menandakan bahwa kelangsungan program kesejahteraan sangat tergantung pada kestabilan pendanaan dan kolaborasi antar lembaga pemerintah (Destyan H. Sujarwoko, 2025). Dalam pandangan negara kesejahteraan, situasi ini menunjukkan bahwa sistem pendanaan dan pengelolaan anggaran merupakan elemen krusial untuk memastikan kelangsungan layanan sosial kepada masyarakat.

Tabel.1 Perkiraan Jumlah Siswa Terkena Keracunan

Tahun	Nama/Keterangan SPPG	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Durasi / Waktu Penghentian
2025	SPPG di Desa Kedungcangkring	Kecamatan Pagerwojo	Mulai 13 Nov 2025 dihentikan sementara karena belum menerima dana virtual account operasional
2025	SPPG Waung 2	Desa Waung, Kecamatan Boyolangu	Operasional dihentikan dua hari (5–6 Dec 2025) karena dana dari BGN belum mencukupi
2026	SPPG Wates	Kecamatan Sumbergempol	Dihentikan sementara layanan MBG karena dana operasional belum cair (Feb 2026)
2026	Dua SPPG di Tulungagung	*Tidak disebutkan nama spesifik*	Dihentikan sementara operasional karena dana belum cair (pertengahan Feb 2026)

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Selain itu, tantangan penerapan negara kesejahteraan juga tampak pada dimensi kualitas layanan serta keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Beberapa laporan mengindikasikan adanya dugaan kasus keracunan makanan pada siswa di beberapa sekolah setelah mengkonsumsi menu MBG.

Tabel.2 Perkiraan Jumlah Siswa Terkena Keracunan

Lokasi / Sekolah	Perkiraan Jumlah Siswa Terkena Keracunan / Gejala Keracunan	Periode / Tanggal	Keterangan Singkat & Sumber
SDN 3 Bungur, Kecamatan Karangrejo	± 24 siswa mengalami mual, muntah, pusing, lemas	Feb 2026	Diduga keracunan setelah konsumsi menu MBG; beberapa siswa dirawat di Puskesmas (Jatim Now)
SMKN 3 Boyolangu	± 123 siswa mengalami diare & gangguan pencernaan	Jan 2026	Diduga keracunan makanan dari menu MBG (TIMES Jogja)
SMP Negeri 1 Boyolangu	± 55 siswa mengalami gejala keracunan	Okt 2025	Laporan gejala mual dan anehnya bau makanan setelah konsumsi MBG (Trenggaleknjenggelek.jawapos.com)

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Walaupun masih dalam proses penyelidikan, insiden tersebut memperlihatkan adanya potensi risiko dalam sistem pengawasan serta standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Contohnya, pada tahun 2026 tercatat sekitar 123 siswa mengalami masalah pencernaan setelah makan makanan dari program MBG di salah satu SMK di Kabupaten Tulungagung (Antara et al., 2026). Ini menunjukkan bahwa dalam negara kesejahteraan, prioritas utama harus diberikan pada kualitas pelayanan publik, sebab ketidakmampuan menjaga standar layanan dapat langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat

Selain dimensi pelayanan, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tulungagung juga mencerminkan peran negara dalam memastikan keadilan sosial dan inklusivitas layanan publik. Namun, tetap ada tantangan dalam menyusun menu khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK), sehingga beberapa penerima manfaat belum mendapatkan layanan sesuai kebutuhan kesehatan mereka. Keadaan ini mengindikasikan bahwa asas keadilan dalam negara kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai, sebab layanan publik seharusnya dapat mencakup semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Keterbatasan dalam menyediakan menu khusus untuk

kelompok tertentu mencerminkan pentingnya memperkuat sistem layanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam (Wibowo et al., 2020).

Secara keseluruhan, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha menjalankan peran negara kesejahteraan dengan menyediakan layanan gizi bagi masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, masalah pendanaan, mutu layanan, dan koordinasi antar institusi. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola kebijakan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta perbaikan sistem pengawasan dan pendanaan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat local.

B. Tantangan Implementasi Program MBG Di Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung adalah salah satu jenis kebijakan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan gizi, terutama untuk anak-anak sekolah. Program ini menggambarkan peran negara dalam konteks negara kesejahteraan, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam pandangan *welfare state,* negara bukan hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penyedia layanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata (Esping-Andersen, 1990).

Meski begitu, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tulungagung juga menghadirkan beberapa kritik dari masyarakat, terutama mengenai kualitas dan komposisi menu makanan yang diperuntukkan bagi siswa. Sebagian orang tua siswa menilai bahwa pilihan menu yang ada belum sepenuhnya mencerminkan standar gizi yang seimbang, karena dalam beberapa kasus, paket makanan hanya terdiri dari kombinasi makanan ringan seperti kue, buah, telur rebus, dan kacang. Situasi itu menimbulkan anggapan bahwa program MBG belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat terhadap kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak (Adhar Muttaqin, 2026).

Di samping itu, terdapat keluhan mengenai kesederhanaan menu yang dinilai terlalu sedikit jika dibandingkan dengan tujuan program nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat. Dalam berbagai laporan media, paket makanan yang diterima oleh siswa hanya terdiri dari roti kemasan, buah, dan susu, sehingga sebagian masyarakat berpendapat bahwa komposisi tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak secara optimal(Cholifatun Nisak, 2026). Masalah lain yang dilaporkan mencakup temuan makanan yang tidak layak konsumsi dan sistem distribusi makanan yang kadang dilakukan secara bertahap untuk beberapa hari sekaligus, yang dapat menurunkan kualitas makanan yang diterima oleh siswa (Abdul Malik Hasim, 2026).

Dalam pandangan negara kesejahteraan modern, situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sosial tidak hanya dinilai dari adanya program, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara kesejahteraan masa kini menekankan signifikansi kualitas pelayanan publik, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat (Greve, 2023). Oleh karena itu, beragam keluhan masyarakat mengenai program MBG di Kabupaten Tulungagung dapat dipahami sebagai aspek dari dinamika pelaksanaan kebijakan publik yang membutuhkan evaluasi terus-menerus. Dengan sudut pandang itu, tanggapan masyarakat tentang menu MBG dapat menjadi saran berharga bagi pemerintah untuk meningkatkan mutu program, terutama pada aspek standar gizi, pengawasan kualitas makanan, dan sistem distribusi pangan. Melalui perbaikan yang terus-menerus, program MBG diharapkan dapat berjalan dengan baik sebagai alat negara dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta memperkuat peran negara kesejahteraan di tingkat lokal.

C. Analisis Peran Negara Melalui Program MBG Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melaksanakan fungsi negara kesejahteraan, yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui intervensi kebijakan publik. Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penyedia layanan sosial yang fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. Program ini bertujuan untuk menurunkan kerentanan gizi, memperbaiki kesehatan, dan mendukung kualitas sumber daya manusia sebagai investasi sosial yang (Esping-Andersen, 1990).

Di Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan MBG telah dimulai sejak Januari 2025 dengan lokasi awal di Pondok Pesantren Al Azhaar, Kecamatan Kedungwaru. Pada tahap awal, sebanyak 1.386 santri mendapatkan layanan makanan bergizi secara gratis, dan dapur umum yang disiapkan ditujukan untuk melayani sekitar 3.470 siswa di sekolah-sekolah terdekat(David Yohanes, 2025).Data ini mengindikasikan bahwa program MBG tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi telah ditujukan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan akses langsung terhadap pangan bergizi. Kehadiran program ini turut membantu mengurangi beban biaya rumah tangga, khususnya bagi keluarga berpendapatan rendah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung belum dapat dianggap sepenuhnya sukses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sudah menunjukkan kemajuan yang positif sebagai program sosial pemerintah. Keberhasilan program kesejahteraan bukan hanya ditentukan oleh adanya program, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, keberlanjutan, dan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks Tulungagung, MBG sudah berkontribusi dalam memberikan akses makanan bergizi untuk pelajar dan kelompok penerima manfaat, tetapi pelaksanaannya masih mengalami beberapa tantangan teknis dan administratif

Secara positif, MBG dapat meningkatkan kesejahteraan karena mampu menekan pengeluaran keluarga, terutama untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Dengan tersedianya makanan gratis di sekolah atau institusi pendidikan, orang tua tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk bekal anak. Di samping itu, program ini juga dapat memperbaiki kesehatan dan fokus belajar anak, yang dalam jangka panjang berdampak pada mutu sumber daya manusia (Esping-Andersen, 1990). Ini menunjukkan bahwa dalam konsep, MBG sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.

Namun, dalam aspek pelaksanaan, masih terdapat berbagai masalah yang menghalangi efektivitas program di Tulungagung. Sejumlah laporan mengindikasikan adanya masalah dalam distribusi makanan yang tidak merata, keterlambatan dalam penyajian, menu yang tidak memenuhi selera anak, serta kualitas makanan yang dianggap kurang baik. Apabila makanan tidak dihabiskan atau kualitas gizi tidak memenuhi standar, maka tujuan utama dari program menjadi kurang tercapai. Di samping itu, adanya keterbatasan dapur umum, sumber daya pelaksana, serta mekanisme pengawasan juga menjadi tantangan yang signifikan (Alfred, 2026)

Dari perspektif kesejahteraan sosial, program MBG juga belum secara langsung mengatasi isu struktural masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, atau rendahnya pendapatan rumah tangga. Program ini lebih tepat dipahami sebagai dukungan sosial pencegahan, yang mendukung kesejahteraan, bukan sebagai solusi tunggal. Dengan kata lain, MBG dapat memberikan dukungan kepada masyarakat, namun hasilnya akan lebih optimal jika dipadukan dengan kebijakan lain seperti pembangunan lapangan kerja, bantuan untuk UMKM, layanan kesehatan, dan pendidikan yang adil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Program MBG di Tulungagung belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi sudah merupakan langkah awal yang penting. Program ini sukses memberikan akses gizi dan menurunkan beban ekonomi sebagian masyarakat, namun efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai masalah teknis dalam penyampaian dan pelaksanaan. Di masa mendatang, keberhasilan MBG sangat tergantung pada peningkatan kualitas makanan, distribusi yang tepat waktu, pengawasan yang ketat, serta kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat. Apabila

tantangan tersebut berhasil diselesaikan, MBG berpotensi menjadi alat kesejahteraan yang lebih nyata dan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung mencerminkan bahwa negara telah melaksanakan fungsi welfare state dengan menyediakan layanan pemenuhan gizi untuk kelompok rentan, seperti siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan perluasan cakupan penerima manfaat menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan hak dasar masyarakat di bidang pangan dan kesehatan. Dalam konteks ini, Program MBG telah membawa dampak menguntungkan dengan bertambahnya akses untuk memperoleh makanan bergizi dan berkurangnya beban biaya rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Akan tetapi, temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan MBG di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah masalah, seperti keterbatasan kapasitas produksi dari dapur umum, distribusi makanan yang belum merata, keterlambatan dalam penyaluran, penghentian layanan sementara akibat masalah pendanaan, serta lemahnya pengawasan kualitas pangan yang memunculkan dugaan kasus keracunan makanan. Di samping itu, kualitas serta variasi menu yang dianggap belum memenuhi standar kebutuhan gizi menunjukkan bahwa manfaat program belum sepenuhnya dirasakan oleh semua penerima manfaat.

Penemuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sosial tidak hanya dapat diukur dari adanya program, tetapi juga ditentukan oleh mutu pengelolaan, kesiapan sumber daya, keberlanjutan anggaran, koordinasi antar instansi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyajikan pelayanan publik yang responsif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Program MBG di Kabupaten Tulungagung dapat dianggap sebagai upaya strategis untuk mencapai kesejahteraan sosial, tetapi belum sepenuhnya meraih target tersebut karena masih menghadapi tantangan implementasi yang berarti. Dengan demikian, optimalisasi Program MBG memerlukan penguatan sistem pendanaan, peningkatan kualitas menu dan keamanan pangan, penambahan kapasitas infrastruktur layanan, serta pengawasan yang lebih ketat dan terus-menerus. Apabila perbaikan tersebut diterapkan secara berkesinambungan, Program MBG berpotensi menjadi alat kebijakan sosial yang efisien dalam memperkuat fungsi negara kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, W., Bakhtiar, Y., Muchtar, H., & Sari, O. P. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Studi Pada SMA Negeri 2 Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan). *EDU RESEARCH*, *6*(2), 424–431. https://doi.org/10.47827/jer.v6i2.820

Abdul Malik Hasim Sumber Artikel berjudul " Menu Makan Bergizi Gratis Diduga Tak Layak, B. T. 'Saya A. T. G. ", selengkapnya dengan link: https://jatim. pikiran-rakyat. com/jawa-timur/pr-37410062414/menu-makan-bergizi-gratis-diduga-tak-layak-bupati-tulungagung-saya-akan-turun-gunung. (2026, March 8).

Adhar Muttaqin. (2026, March 26). Menu MBG di Tulungagung Dikritik Wali Murid: Mirip Oleh-oleh Hajatan. *Https://Www.Detik.Com/Jatim/Berita/d-8372505/Menu-Mbg-Di-Tulungagung-Dikritik-Wali-Murid-Mirip-Oleh-Oleh-Hajatan*.

Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, *4*(3), 362–368. https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368

Alfred. (2026, January 13). BGN Kebut Dapur Makan Bergizi Gratis di Tulungagung, Target 100 Unit Berita ini telah tayang di Koran Jakarta dengan judul "BGN Kebut Dapur Makan Bergizi Gratis di Tulungagung, Target 100 Unit" https://koran-jakarta.com/2026-01-13/bgn-kebut-dapur-makan-bergizi-gratis-di-tulungagung-target-100-unit. *Https://Koran-Jakarta.Com/2026-01-13/Bgn-Kebut-Dapur-Makan-Bergizi-Gratis-Di-Tulungagung-Target-100-Unit*.

Antara, Ronny Wicaksono, & Ahmad Rizki Mubarok. (2026, January 20). Dan Terjadi Lagi, Dugaan Keracunan MBG Dialami Ratusan Siswa SMKN 3 Boyolangu Tulungagung.

Https://Timesindonesia.Co.Id/Peristiwa-Daerah/574249/Dan-Terjadi-Lagi-Dugaan-Keracunan-Mbg-Dialami-Ratusan-Siswa-Smkn-3-Boyolangu-Tulungagung.

Badan Gizi Nasional. (2026, April 1). Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah operasional. *Https://Bgn.Go.Id/Operasional-Sppg?Search=tulungagung*.

Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Kusuma, N. A., & Hadji, K. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 1413–1423. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3208

Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional. (2025, May 7). Pentingnya Program MBG: Tingkatkan SDM dan Pencegahan Stunting. *Https://Www.Bgn.Go.Id/News/Artikel/Pentingnya-Program-Mbg-Tingkatkan-Sdm-Dan-Pencegahan-Stunting*.

Cholifatun Nisak. (2026, March 4). Viral MBG Ramadan Diprotes Emak-Emak, Menu Makan Bergizi Gratis Disebut Tak Layak dan Tak Sesuai Anggaran Rp15 Ribu. *Https://Radartulungagung.Jawapos.Com/Nasional/767268618/Viral-Mbg-Ramadan-Diprotes-Emak-Emak-Menu-Makan-Bergizi-Gratis-Disebut-Tak-Layak-Dan-Tak-Sesuai-Anggaran-Rp15-Ribu?Utm_source=chatgpt.Com#goog_rewarded*.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

David Yohanes. (2025, January 6). Program Makan Bergizi Gratis di Tulungagung Resmi Dimulai, Sekolah Ini Jadi Pelaksana Pertama . Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Program Makan Bergizi Gratis di Tulungagung Resmi Dimulai, Sekolah Ini Jadi Pelaksana Pertama, https://surabaya.tribunnews.com/2025/01/06/program-makan-bergizi-gratis-di-tulungagung-resmi-dimulai-sekolah-ini-jadi-pelaksana-pertama.

David Yohanes | Editor: Titis Jati Permata. *Https://Surabaya.Tribunnews.Com/2025/01/06/Program-Makan-Bergizi-Gratis-Di-Tulungagung-Resmi-Dimulai-Sekolah-Ini-Jadi-Pelaksana-Pertama.*

Destyan H. Sujarwoko. (2025b, August 24). SPPG Polres Tulungagung resmi beroperasi layani 3.047 penerima manfaat. *Https://Www.Antaranews.Com/Berita/5060713/Sppg-Polres-Tulungagung-Resmi-Beroperasi-Layani-3047-Penerima-Manfaat#:~:Text=SPPG%20Polres%20Tulungagung%20resmi%20beroperasi%20layani%203.047%20penerima%20manfaat%20%2D%20ANTARA%20News*.

Destyan H. Sujarwoko. (2025c, December 6). SPPG Tulungagung hentikan operasional karena masalah pendanaan. *Https://Jatim.Antaranews.Com/Berita/1011499/Sppg-Tulungagung-Hentikan-Operasional-Karena-Masalah-Pendanaan#:~:Text=Kepala%20SPPG%20Waung%202%20Kecamatan,Berjalan%20seperti%20biasa%2C%E2%80%9D%20ujarnya.*

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. *Polity*.

Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia Timur: Tantangan, implementasi, dan solusi untuk ketahanan pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, *4*(1), 14–21. https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641

Greve, B. (2023). *Welfare states in a turbulent era*. Edward Elgar Publishing.

Herdiana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(2), 470–478. 10.5281/zenodo.15063556

Huda, M. (2009). *Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: sebuah pengantar*. Pustaka Pelajar.

Humas. (2026, January 6). Presiden Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis Jawaban Negara atas Masalah Gizi Anak Read more: https://setkab.go.id/prabowo-tegaskan-program-makan-bergizi-gratis/. *Https://Setkab.Go.Id/Prabowo-Tegaskan-Program-Makan-Bergizi-Gratis/*.

Kelara, B. N., Siregar, T. R. Y., Febrianti, R., Mardyaningsih, W., Ghozali, A., & Rinandy, A. A. (2025). PRogram Makan Bergizi Gratis Dan Kesejahteraan Pekerja Umkm: Peran Penyerapan Sdm Dan Kondisi Keuangan Rumah Tangga Di Palembang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing Dan Akuntansi*, *10*(2), 161–168. https://doi.org/10.54077/jembatan.v10i2.247

Keynes, J. M. (2018). *The general theory of employment, interest, and money*. Springer.

Lukman. (2026, February 23). Bupati Tulungagung Tegaskan Komitmen Sukseskan Program MBG di Jawa Timur. *Https://Finews.Co.Id/Peristiwa/2026/Bupati-Tulungagung-Tegaskan-Komitmen-Sukseskan-Program-Mbg-Di-Jawa-Timur/*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.

Nurulaini, R., & Afifah, D. F. (2025). Implementasi Program MBG Untuk Meningkatkan Gizi Anak Sekolah Dasar Di Kota Semarang 2025. *Jurnal Sosial Teknologi*, *5*(11), 4249–4259. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i11.32520

Orbawati, E. B., Mukti, A., Aufa, R., Karunia, I., & Ikhtiara, S. (2025). Policy to Practice Gap dalam Program Makan Bergizi Gratis: Studi SWOT di Magelang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(4), 797–810. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5982

Pora, S., & Muksin, D. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi dan Tantangan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *11*(2), 635–694. https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4352

Raihan A. Hanasi, Izzatunnisa Akuba, Israh Miranti Wahab, Cipta Monoarfa, Muhajir Riza M. Ahmad, & Alya Putri Pantoiyo. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pendorong dan Pembangunan Ekonomi Lokal. *JUMBIKU*, *6*(1), 95–112. https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6403

Raihan A. Hanasi, Moh Rizal Tuna, Dwi Pianita Burhan, Marsha Oktaviani Sila, Adha Ladjulu, & Sitti Nurhalima Abuba. (2025). Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah. *JURNAL PENDIDIKAN TEMBUSAI*, *9*(3). https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.34647

Romauli Panggabean. (2025, January 16). Mengoptimalkan Pangan Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Https://Wri-Indonesia.Org/Id/Wawasan/Mengoptimalkan-Pangan-Lokal-Dalam-Program-Makan-Bergizi-Gratis*.

Wibowo, A. W., Fitri, W. Y., & Sentiya, M. (2020). Pelayanan Publik Berbasis E-Health Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional''Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Indusri 4. O"*, 597–619.